



Teologi Publik: Membangun Etika Politik dan Demokrasi di Indonesia

A. Bagus Laksana, S. J.
Universitas Sanata Dharma

Teologi Publik dan Etika Politik

- ❖ Buku ini pantas diapresiasi: memberikan panorama dan peta “teologi publik” di Indonesia; ini penting untuk mulai meretas kebuntuan-kebuntuan mgn peran publik agama di Indonesia.
- ❖ Pertanyaan dasarnya adalah: apa “*conditions of possibility*” untuk teologi publik di Indonesia sehingga bisa menjadi sungguh “publik”: Punya efek terhadap common good, res publica?
- ❖ Modal konseptual: buku ini memetakan modal-modal konseptual untuk beberapa hal pokok, seperti kebangsaan, kesatuan kemanusiaan, agama maslahat, kebaikan umum dll.
 - ❖ Yang belum dieksplorasi adalah: konsep-konsep mengenai ketuhanan dalam hubungannya dengan skeptisisme, sekularisasi, ilmu pengetahuan/sains, teknologi AI dan regulasinya, etc.
 - ❖ Ada sikap anti-intelektualisme di dalam politik kita: teologi publik membutuhkan rasionalitas publik, bukan hanya rasionalitas agama
- ❖ Modal institusional:
 - ❖ Banyak institusi agama yg besar dengan pengaruh yang kuat di masyarakat, tetapi belum ada formula utk mempengaruhi politik dan demokrasi scr nyata dan sustainable



- ❖ Modal kultural: cukup banyak, harmoni, kerukunan, praktik-praktik kultural lokal yg dibahas dlm buku ini
 - ❖ Tetapi modal pengalaman kolaboratif yg massif dan nasional sebetulnya cukup jarang, misalnya soal ekologi.
 - ❖ Paus Fransiskus disambut dengan gegap gempita oleh pelbagai kelompok agama secara simbolis dan afektif, tetapi belum diikuti oleh gerakan ekologi antar agama yg lebih nyata
- ❖ Modal “politik”: paling problematis, tetapi juga musiman; mood politik
 - ❖ Bagaimana mengatasi “perbedaan” dalam tafsir agama mengenai “*common good*” dan pembelaan terhadap kelompok-kelompok yg tersingkir, tetapi yg sensitif?
 - ❖ Misalnya soal agama dan tambang, agama dan perkebunan, agama dan kelompok LGBT, perdamaian dunia (keanggotaan Indonesia di Board of Peace)
 - ❖ Organisasi keagamaan di Indonesia memiliki kepentingan politik yg berbeda-beda
 - ❖ Yang masih kurang: dimensi dialog antar agama dlm membentuk teologi publik yang mempunyai daya ubah —> perjalanan masih panjang



Persoalan “public sphere” di Indonesia

❖ “Public sphere” di Indonesia:

- ❖ belum pernah “tersektularisasi” secara demokratis, seperti di Barat, sehingga DEMAND atau tuntutan (misalnya rasionalitas) dari re-transformasi kehadiran agama di publik sekarang belum jelas.
- ❖ Kita msh mencari-cari langgam dan pola kehadiran agama di ruang publik yng pas
 - ❖ Ruang publik di Indonesia belum pernah lepas dari “politisasi agama” (komodifikasi, instrumentalisasi agama), atau sebaliknya: kekuatan agama menginstrumentalisasi politik;
 - ❖ Justru ada kecenderungan konservatisme agama di ruang publik;
- ❖ Praktik politik kita sebenarnya sangat “sekular” dlm pengertian negatif (jauh dari nilai-nilai dan etika agama dan spiritualitas yg sebenarnya), tetapi bukan “sekular” dlm pengertian positif (rasional, inklusif, demokratis, common good)
- ❖ Ada ide-ide sekular yg muncul dan menguat secara periodik, tetapi belum menjadi bagian dari pilar-pilar untuk kehidupan publik (rasionalitas, sains, hak asasi manusia, hak warga negara, supremasi hukum)
- ❖ Mungkin ruang publik kita memang tidak akan pernah lepas dari agama karena keunikan sejarah, dinamika masyarakatnya, dan pengaturan-pengaturan hukum;
 - ❖ ini menjadi kondisi yang UNIK, sekaligus AGONISTIK.
 - ❖ Harus dihadapi dengan “strategi kebudayaan” yg khusus
 - ❖ Mungkin perlu public theology yg proper mengenai public sphere itu sendiri.
- ❖ Lain dengan di Eropa: agama dan masyarakat disektularisasi, lalu agama baru boleh kembali ke publik dengan pengawasan ketat (yg juga agonistik utk komunitas agama)



Theology for Public Life dan Public Theology

- Perlu diperhatikan:
 - perbedaan antara “theology for public life” dan “proper public theology.”
- Buku ini lebih banyak memberi ilustrasi mengenai “theology for public life” dari perspektif Islam dan Kristiani
- Contoh-contoh Christian theology for public life:
 - theologies that respond to larger societal issues from within the Christian faith:
 - liberation theology,
 - Catholic social teaching,
 - Christian political theologies,
 - and contextual theologies.
- “Proper public theology” begins from the common concerns and engages the questions through certain methods that allow for more significant roles of other parties, so that the results would be more easily recognizable and appropriated by the plural public
 - “Roles of other parties” ini yang msh belum dibahas dan dilakukan
 - “Agama maslahat”: perlu dikonstruksi secara “bersama” - tuntutan dan implikasinya untuk Indonesia.



Agenda Teologi Publik ke Depan

- ❖ Perlu adanya koalisi publik dan interreligius yang lebih besar dan massif yg bergerak di lapangan, dengan backup teologi publik dari para pemikir dan pemimpin
- ❖ Mengenai musuh-musuh demokrasi:
 - ❖ Soal gejala “fascisme”; megalomania dari pemimpin bangsa
- ❖ Peringatan Horkheimer dan Adorno: “One of the lessons of the Hitler period is the stupidity of cleverness”
 - ❖ “According to the clever people, fascism was impossible in the West.”
- ❖ Apakah “optimisme intelektual” kita akan bernasib sama? “Fascism is impossible in Indonesia?”
- ❖ Teologi publik perlu memberi “konstruksi” baru thd makna dan implikasi Pancasila dan kebangsaan secara baru, misalnya soal gejala fascisme ini, dlm gerak bersama antar kelompok
 - ❖ Teologi publik mengenai kepemimpinan (engagement dgn budaya Nusantara - dimensi enchantmentnya, misalnya gathering, festival
 - ❖ Pembahasan mengenai peran kultur dlm buku ini pantas diapresiasi; tantangannya adalah bagaimana kekuatan kultur yg lokal itu bisa disinergikan untuk agenda politik nasional.
 - ❖ Kekuatan agama sebagai kekuatan trans-lokal, nasional, dan internasional perlu dieksplorasi.



Salah satu agenda Ke depan

- ❖ Teologi publik kontekstual —> public theology of human flourishing —> agar lebih universal juga; dgn kekayaan Indonesia...
 - ❖ Indonesia: skor human flourishing nya paling tinggi, tetapi jadi bahan olok-olok publik karena ditafsirkan oleh pejabat negara sbg prestasi
 - ❖ Agar “human flourishing” menjadi rujukan untuk etika publik, termasuk penggunaan APBN oleh para politisi
 - ❖ Agar flourishing menjadi tujuan demokrasi
- ❖ Pilar teologi flourishing
 - ❖ Sentire cum humanum
 - ❖ Sentire cum terra
 - ❖ Dari “nature” ke “creation”; gerakan teologi publik untuk “tanah air”

